

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Lokasi geografis Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudera, dan posisinya di jalur lalu lintas perdagangan internasional akan membawa manfaat ekonomi bagi Indonesia dalam membangun hubungan diplomatik dengan negara-negara lain di seluruh dunia, dan ini akan berdampak besar pada Indonesia terutama di negara ini.

Memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai cara diplomasi akan memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama dengan negara lain. Ketertarikan Indonesia dalam negosiasi adalah langkah yang harus diambil dalam menciptakan hubungan yang erat dan mempertimbangkan bahwa Indonesia berada pada *World Cross Position*.

Luas wilayah Indonesia 80% berupa laut dan luasnya mencapai 5.800.000 km² dengan garis pantai sepanjang 80.791 km. Secara geografis Indonesia memiliki letak yang strategis antara persilangan dua samudera dan dua benua, sehingga laut Indonesia menjadi alur laut yang sangat penting untuk jalur perdagangan dunia dan lintas pelayaran internasional. Ini menjadi bukti bahwa Indonesia berfungsi sebagai *The Global Supply Chain System* dengan posisi geografis tersebut.

Peran transportasi laut sangat penting dalam mendukung konektivitas antar pulau di Indonesia jika dibandingkan dengan transportasi udara dan transportasi darat. Indonesia tidak hanya bagaimana mengembangkan kompetisi transportasi laut, tetapi juga bagaimana mengembangkan pelabuhan yang ada di Indonesia untuk memenuhi standar internasional.

Dari posisi Indonesia yang berada di jalur strategis perdagangan internasional menjadi peluang besar dalam meningkatkan bagian perekonomian dan sangat penting untuk di fokuskan, dengan dibantu oleh pemerintah yang akan mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

Indonesia adalah negara kepulauan, ini adalah bukti kuat bahwa kondisi tersebut diperlukan untuk memiliki keamanan yang sangat kuat di bagian laut dan udara. Ini menjadi sangat penting, karena melihat dari sudut pandang keamanan tradisional ancaman akan datang dari laut dan udara. Ancaman terhadap keamanan suatu negara tidak selalu invasi militer dari negara lain. Non-Tradisional adalah salah satu penguasaan sumber daya alam laut Indonesia dengan bentuk lain masuknya kekuasaan dari negara lain yang dapat mengancam kedaulatan negara.

Menurut Barry Buzan, konsep keamanan Non-Tradisional lebih ditekankan kepada pelaku-pelaku bukan dari negara (*non state actors*). Buzan juga menilai bahwa keamanan tidak hanya diletakkan dalam sudut pandang kedaulatan nasional dan kekuatan militer. Konsepsi ini juga ditujukan kepada keamanan warga negara dan keamanan manusianya. Seperti diketahui, kumpulan Tradisional lebih menaruh minat mengurangi rancangan keadaan (*de-sekuritisasi*) dan sementara Non-Tradisional mempunyai keinginan untuk berkembang (*sekuritisasi*) (Barry Buzan, 1998).

Rancangan keadaan Non-Tradisional tetap berkembang dan sudah memengaruhi catatan rangkaian luar negeri (*foreign policy*) mempunyai persamaan negara tergolong Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki ancaman keamanan Non-Tradisional, sehingga Indonesia memiliki kepentingan nasional untuk mengatasi masalah tersebut. Di Indonesia, setidaknya ada empat ancaman Non-Tradisional, termasuk Wilayah, Energi Terbarukan, perpindahan penduduk dan jaringan terorisme.

Hal ini terlihat dengan serangkaian kejadian tindak pidana transnasional seperti pada tahun 2015 adanya penyelundupan narkoba di perbatasan Papua. Penyelundupan narkoba tersebut dari jaringan internasional dengan barang bukti 4 kilogram sabu di pos perbatasan Indonesia-papua nugini di wutung, distrik muara tami, jayapura. Diketahui narkotika jenis sabu tersebut berasal dari manila, filipina, lalu di bawa ke pelabuhan Moresby, ibukota papua nugini.

Menurut Badan Perbatasan dan Kerja sama Luar Negeri (BPKLN), provinsi papua mengatakan banyak terdapat jalan tikus yang digunakan untuk melakukan penyelundupan narkoba jenis ganja, sabu dan transaksi ilegal. Jalur tikus tersebut sering kali digunakan dengan dimasukkannya barang haram tersebut ke dalam kapal nelayan.

Gambar 1 KRI Albakora 867



Sumber: Indomiliter, 2018

Pada tahun 2018, kapal laut terbaru punya Angkatan Laut adalah kapal perang bangsa yang diproduksi oleh PT Caputra Mitra Sejati, Banten. Keberadaan KRI Albakora-867 akan memperkuat Pangkalan Angkatan Laut (Lantamal) X Jayapura, Armada Komando III.

Menurut pihak Angkatan Laut, keberhasilan membuat kapal PC-40 adalah manifestasi dari peran Angkatan Laut Indonesia dalam memberdayakan industri dalam negeri untuk mengurangi pembelian produk-produk asing. Keberhasilan ini juga merupakan salah satu hasil konkret bagi Komite Kebijakan Industri Keamanan (KKIP) untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain terkait dengan pengadaan TNI ALutsista di masa depan.

Dalam pemetaan industri pendukung produksi senjata di Indonesia, pernah dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada tahun 1980-an, namun jejak hasilnya tidak dapat ditemukan lagi. Dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi dalam tiga puluh tahun terakhir, dengan kata lain globalisasi industri keamanan dan masuknya sejumlah perusahaan swasta nasional ke dalam wilayah produksi senjata di Indonesia, seharusnya memang perlu dilakukan pemetaan kemampuan Industri Keamanan yang memperbaharui perkembangan terkini.

Dampak strategi pengadaan terhadap struktur industri ini semakin kuat di abad ke-21, dengan adanya kecenderungan untuk memperpanjang masa pakai barang (*life cycle*) untuk mengurangi pengadaan baru. Permasalahan lain adalah strategi pemerintah dalam mengatur struktur industri dihadapkan dengan kenyataan meningkatnya ongkos produksi teknologi keamanan yang disebabkan banyaknya muatan teknologi informasi, presisi, sensor jarak jauh, dan lainnya ke dalam platform.

Negara-negara di wilayah Asia Pasifik sudah memodernisasi pasukan keamanan, dan dibantu oleh pembangunan perekonomian yang sangat baik. Tujuannya bukan untuk kesamaan dan melebihi kualitas yang lainnya, tapi harus juga untuk membuat perhitungan asosiasi karena tidak pasti dalam keadaan strategik. Pembaharuan senjata provokatif dan sistim proses yang menyebabkan pengeluaran juga pendapatan. Perbuatan/tanggapan kejadian yang salah juga menyebabkan keadaan sulit dan terancam, paling utama yang berkaitan dengan kemampuan perselisihan yang sedang berjalan di wilayah tersebut, seperti di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.

Modernisasi kekuatan militer sangat dipercaya oleh keadaan teknologi keamanan. Banyak negara di wilayah ini telah menggunakan metode ini untuk modernisasi sistem senjata tradisional strategis dan sistem pengawasan terpadu terbaru yang sebagai Komando, Kontrol, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4IPP) dan sistem keamanan dunia maya. Khusus tentang siber, saat ini perang siber telah menjadi strategi untuk menimbulkan kerugian yang berdampak strategis pada suatu negara (Kemhan, 2015).

Menteri Keamanan Ryamizard Ryacudu mengharapkan industri keamanan dalam negeri terus meningkatkan hasilnya jadi Indonesia tidak bergantung kepada negara lain dalam memenuhi kebutuhan keamanannya. Sejumlah produk strategis sudah mampu diproduksi perusahaan dalam negeri. Seperti pesawat dan tank, serta kapal selam oleh PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (Antara, 2018).

Wilayah Asia Pasifik saat ini masih memiliki kemampuan perkara batas yang tidak bisa dituntaskan. Fakta yang paling membuktikan tentang salah satu penyebab utama yang terjadi adalah perdebatan tentang batas-batas. Konflik dan krisis yang terjadi di wilayah ini dapat meningkatkan tantangan Non-Tradisional.

Indonesia memiliki bentang alam yang luas dan sumber daya alam yang luar biasa, dari berbagai sektor seperti pertanian, pangan, energi, dan maritim yang dapat dimanfaatkan. Pengelolaan dan pemanfaatan Sektor Maritim harus dilakukan secara bertanggung jawab, untuk menjaga kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Untuk memperkuat dimensi laut, Indonesia membutuhkan perubahan signifikan dalam militernya untuk dapat mendukung tugas-tugas dasar. MEF (*Minimum Essential Force*) adalah struktur kekuatan dari keamanan suatu negara yang berada pada level yang termasuk untuk mencapai kepentingan nasional dan objek keamanan keamanan.

Hubungan antara modernisasi alutsista dengan ancaman tidaklah sama, melainkan masing-masing memiliki kadar kepentingannya sendiri. Bicara soal modernisasi alutsista, ini merupakan tahapan rutin yang dilakukan oleh Angkatan

Militer Indonesia dalam menyeimbangi kualitas alutsista dengan negara lain. Dengan adanya modernisasi alutsista ini, peremajaan armada-armada Angkatan Laut Indonesia diperbaharui guna mendapatkan hasil yang optimal dalam menanganai ancaman-ancaman di wilayah perairan.

Kemudian bicara mengenai ancaman adalah suatu usaha baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara. Ancaman yang menggunakan senjata dan tidak menggunakan senjata dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara.

Jika dibandingkan antara modernisasi alutsista dengan ancaman tentu ini merupakan hal yang sangat berbeda. Karena masing-masing memiliki kapasitas dan kepentingannya sendiri. Dengan judul penulis, Modernisasi Alutsista Kekuatan Laut Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Non-Tradisional di Wilayah Perairan Papua adalah bukan berarti modernisasi alutsista dilakukan karena adanya ancaman, melainkan memang sudah terjadwal untuk melakukan modernisasi alutsista.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana modernisasi alutsista kekuatan laut Indonesia dalam menghadapi ancaman Non-Tradisional di wilayah perairan papua periode 2015-2018?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Indonesia dalam menghadapi ancaman Non-Tradisional di wilayah perairan papua.
2. Untuk menganalisis proses modernisasi alutsista kekuatan laut Indonesia dalam menghadapi ancaman Non-Tradisional di wilayah perairan wilayah papua.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan pengetahuan tentang langkah modernisasi alutsista kekuatan laut Indonesia dalam menghadapi ancaman Non-Tradisional di wilayah perairan papua.
2. Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti dan akademisi Ilmu Hubungan Internasional guna menambah informasi dan wawasan mengenai langkah modernisasi kekuatan laut alutsista Indonesia dalam menghadapi ancaman Non-Tradisional di wilayah perairan papua.

I.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pertama ini berisikan pengantar kepada permasalahan yang akan diteliti seperti pendahuluan, latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan jelaskan mengenai pembahasan dari literatur literatur yang memiliki kaitan dengan topik penelitian yang mana dapat menjadi pembeda antara penelitian ini dengan literatur literatur yang dipilih, terdapat Kerangka teori, Alur pemikiran dan Asumsi terkait dengan hasil penelitian.

BAB III: METODELOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang mana berupa pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis data, teknik analisis data, serta juga teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: SEJARAH ANCAMAN NON-TRADISIONAL DI PAPUA

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai sejarah ancaman Non-Tradisional di wilayah perairan papua.

BABV :IMPLEMENTASI MODERNISASI KEKUATAN LAUT INDONESIA DALAM MENGHADAPI ANCAMAN NON-TRADISIONAL DI WILAYAH PERAIRAN PAPUA

Bab ini menjelaskan modernisasi alutsista yang digunakan Indonesia yaitu KRI PC-40 Albakora 867 di wilayah perairan papua. Pada bab ini akan dijelaskan spesifikasi dari KRI PC-40 Albakora 867, keunggulan kapal ini dalam medan yang ada di Indonesia.

BAB VI : PENUTUP

Berisi penutup dari penelitian ini. Bab penutup ini berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan rekomendasi ataupun tanggapan terkait dari pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini.

